

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang unik dan beragam. Kondisi geologi Indonesia yg merupakan pertemuan lempeng-lempeng tektonik menjadikan kawasan Indonesia ini memiliki kondisi geologi yang sangat kompleks. Selain menjadikan wilayah indonesia ini kaya akan sumberdaya alam, salah satu konsekuensi logis kekompleksan kondisi geologi ini menjadikan banyak daerah di Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam. Beberapa diantaranya adalah rawan gempa bumi, tsunami serta rawan letusan gunung api disepanjang "ring of fire" dari Sumatra - Jawa - Bali - Nusatenggara - Banda - Maluku

Beberapa tahun belakangan ini jumlah kejadian bencana di Indonesia meningkat cukup tajam. Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun ulah manusia seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/bencana asap dan bencana akibat kecelakaan industri serta kesalahan teknologi, telah mengancam dan berada di tengah lingkaran kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak dari bencana alam tersebut menimbulkan berbagai macam kerugian materi yang jumlahnya sangat luar biasa.

Salah satu contoh bencana alam besar yang kita alami adalah gempa bawah laut berkekuatan 9.1 skala Richter yang terjadi di pantai barat pulau Sumatera yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa tersebut menyebabkan tsunami di sepanjang pantai Samudra India dan menyebabkan kerusakan hebat di banyak negara seperti Thailand, Sri Lanka, India, dan khususnya Indonesia. Diperkirakan lebih dari 225.000 jiwa meninggal akibat

bencana tersebut, dan lebih dari setengahnya berasal dari Indonesia (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2005).

Kapasitas tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh tsunami dan skala tanggap darurat yang harus dilakukan pada saat itu sangat jauh berada di atas kapasitas institusi-institusi lokal. Pada masa-masa awal tanggap darurat, pemerintah, lembaga bantuan kemanusiaan, pihak donor, dan masyarakat mengalami berbagai macam hambatan dalam penyaluran bantuan kepada para korban. Hambatan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya informasi yang tersedia di lapangan dan tidak adanya koordinasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Kekacauan ini semakin diperburuk oleh masuknya ratusan lembaga bantuan kemanusiaan ke daerah yang terkena bencana untuk turut serta memberikan bantuan tanpa adanya koordinasi yang jelas. Operasi bantuan kemanusiaan atau penanggulangan bencana dipenuhi oleh berbagai macam sistem (PBB, Militer, Pemerintah, Palang Merah, I/NGO, dan lain-lain). Sayangnya, masing-masing sistem ini memiliki tingkat konektivitas yang berbeda, dan lembaga-lembaga di dalam sistem tersebut memiliki tujuan, budaya, serta kebutuhan operasional yang berbeda pula, dan hal ini akhirnya menyebabkan persaingan di antara sesama lembaga pemberi bantuan yang ada dalam mendapatkan sumber daya manusia, barang serta jasa. Menentukan kemampuan dari masing-masing organisasi dan apa saja yang telah mereka lakukan pada saat penanggulangan bencana adalah pekerjaan yang sulit, dan koordinasi antara sistem-sistem tersebut merupakan masalah tersendiri.

Permasalahan koordinasi ini juga disebabkan karena biasanya lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan cenderung tidak menyukai struktur komando terpusat, tetapi walaupun tidak saling bekerja sama, paling tidak diharapkan mereka dapat saling berkomunikasi. Di sinilah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus melakukan peran utamanya sebagai badan yang berwenang dalam melakukan koordinasi dalam pemberian bantuan bencana. Tetapi tentunya hal ini tidak dapat dilakukan secara efektif oleh BNPB tanpa

Universitas Indonesia

bantuan suatu sistem manajemen informasi terpadu yang antara lain dapat digunakan untuk menunjang proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data-data yang diperlukan.

Salah satu contoh konkret kekacauan karena tidak adanya koordinasi di lapangan adalah menumpuknya hampir 2700 peti kemas berisi barang bantuan di pelabuhan peti kemas Gabion Belawan Medan lima bulan setelah tsunami karena menunggu selesainya proses kepabeanan (Koran Tempo, 8 Mei 2005). Kondisi penumpukan peti kemas ini selain karena tingginya volume barang bantuan yang masuk, tetapi juga disebabkan oleh kebijakan *custom clearance* yang sering berubah dan tidak dikomunikasikan dengan baik oleh koordinator penanganan bencana pada saat itu (Bakornas), sehingga makin menyulitkan para pemilik barang dalam menyalurkan barang bantuan. Contoh lainnya adalah tidak meratanya penyaluran bantuan yang diberikan kepada para korban, ada beberapa tempat yang mendapatkan bantuan dalam jumlah berlebih, tetapi banyak juga daerah yang menerima bantuan dalam jumlah yang sangat minim.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam karya akhir ini penelitian difokuskan pada usulan pengembangan dan implementasi sistem manajemen informasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai alat bantu koordinasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tanggap bencana. Karena sistem manajemen informasi dapat berfungsi lebih dari hanya sekedar mengatur informasi, tetapi juga dapat berperan sebagai katalis dalam *relationship building* serta menjalin kerjasama antar berbagai pihak yang berkepentingan.

Sebagai contoh, respons tsunami di Aceh menciptakan tingkat kolaborasi yang belum pernah ada sebelumnya antara pemerintah, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga kemanusiaan, dan pihak militer. Kolaborasi ini cukup sulit dilaksanakan dengan efektif karena para pihak yang

berkepentingan memiliki perbedaan geografis, historis, budaya, tujuan, dan kapabilitas yang cukup besar. Oleh karena itu, memaksimalkan efisiensi sistem manajemen informasi diharapkan dapat menunjang proses koordinasi serta pengambilan keputusan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penulisan Karya Akhir ini berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijabarkan adalah untuk mengetahui hal pokok dibawah ini:

1. Memberikan usulan pengembangan dan implementasi sistem manajemen informasi dalam setiap tahap program penanggulangan bencana, khususnya sebagai alat bantu koordinasi bagi para pihak yang terjun langsung di lapangan sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya bencana kemanusiaan.
2. Memaparkan perlunya dilakukan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi sistem penanganan bencana nasional yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dengan tujuan agar penanganan tanggap darurat menjadi lebih efektif.

1.4 Metoda Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis eksploratoris serta interview dengan staff beberapa lembaga yang terlibat atau pernah terlibat dalam koordinasi penanggulangan bencana besar di Indonesia seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah Internasional, dan *Non-governmental Organization* (NGO). Metode analisis eksploratoris yang dilakukan adalah dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber berupa buku teks, jurnal, *website*, artikel majalah,

Universitas Indonesia

koran dan berbagai terbitan report dan buletin, menyangkut hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini, seperti pengetahuan tentang aplikasi dan teknologi informasi yang tersedia, kondisi infrastruktur dan penanganan bencana, regulasi di bidang penanganan bencana, serta kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan penanggulangan bencana.

1.5 Rerangka Penulisan

Rerangka penulisan karya akhir ini akan terbagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang mengapa topik implementasi system informasi management dalam penanggulangan bencana di Indonesia menjadi bahan kajian, perumusan permasalahan, tujuan penulisan, lingkup penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang ada sebagai acuan atau rujukan dalam melakukan kajian dan analisis terhadap topik penelitian.

BAB III PELAKU KEGIATAN TANGGAP BENCANA DI INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai para pelaku utama kegiatan tanggap bencana di Indonesia, badan yang berwenang, serta dasar hukum yang mengatur pelaksanaan tanggap bencana

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan *analisis* kebutuhan pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen sebagai alat bantu koordinasi dalam setiap tahap program tanggap bencana yang sifatnya kompleks, dan melibatkan banyak pihak seperti lembaga donor, organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organization - NGO*) serta pihak militer yang merupakan salah satu elemen terpenting dalam pelaksanaan program tanggap bencana.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menuangkan kesimpulan hasil analisis sesuai dengan tujuan penulisan, serta menyampaikan saran berkaitan seluruh proses analisis yang dilakukan pada karya akhir ini.

